

RENCANA KERJA TAHUN 2017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DINAS PERDAGANGAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II Kabupaten Bantul
Jl. Lingkar Timur Manding Tlirenggo Bantul D.I. Yogyakarta
Telp. (0274) 367338 Fax. (0274) 367054, Email:
dinas.perdagangan@bantulkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS PERDAGANGAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II Kabupaten Bantul
Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul D.I. Yogyakarta
Telp. (0274) 367338 Fax. (0274) 367054, Email:
dinas.perdagangan@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN Kepala Dinas Perdagangan Bantul NOMOR : TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017 KEPALA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL

- Menimbang:
- bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul;
 - bahwa berdasarkan ketentuan pertimbangan tersebut diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2017.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun 2005 -2025;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006 -2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomer 121 17 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- | | |
|---------|---|
| PERTAMA | Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2017. |
| KEDUA | Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2017 yang selanjutnya disebut Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul untuk periode 1 (satu) tahun; |
| KETIGA | Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2017 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Pengelolaan Pasar ini. |

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal

**KEPALA
DINAS PERDAGANGAN**

Ir, SUBIYANTA HADI.MM
Pembina, IV/B
NIP. 19590401 198503 1013

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul merupakan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan selama satu tahun, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran. Dokumen ini juga memuat evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan tahun lalu.

Rencana Kerja Dinas Perdagangan Pasar Kabupaten Bantul sebagai instansi teknis di bidang pengelolaan pasar, berusaha mewujudkan produktivitas rakyat dan daya saing produk di pasar regional, nasional dan internasional yang merupakan prioritas daerah dalam mencapai Nawacita ke 6 yaitu Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Untuk itu penyusunan Renja ini merupakan operasionalisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah kedalam program kegiatan Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul sehingga memberikan kontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program kegiatan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul secara keseluruhan.

Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2018 ini dapat menjadi dari dasar bagi pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Pengelolaan Pasar, sehingga diharapkan dapat mewujudkan akuntabilitas Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul.

Demikian kami ucapkan terima kasih.

Bantul,

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN BANTUL**

Ir. SUBIYANTA HADI.MM
Pembina, IV/B
NIP.19590401 198503 1013

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	v
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TAHUN LALU	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tahun Lalu	5
2.2 Analisis Kinerja SKPD	15
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi SKPD dan Catatan Strategis.....	17
2.3.1 <i>Rekomendasi Catatan Strategis</i>	17
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	17
2.5 Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	22
BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan.....	33
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	33
3.1.1 <i>Arah Kebijakan Nasional di Bidang Perdagangan</i>	33
3.2 Tujuan dan Sasaran	34
3.2.1 <i>Tujuan</i>	34
3.2.2 <i>Sasaran</i>	34
3.3 Visi dan Misi	35
3.3.1 <i>Visi</i>	35
3.3.2 <i>Misi</i>	35
3.4 Program dan Kegiatan	35
3.4.1 Indikator Kinerja Utama	35
BAB IV Penutup	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2016 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomer 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran OPD.

Penyusunan Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul ini diselaraskan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018.

Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2018 menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 yang merupakan perwujudan Visi dan Misi Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, serta menjadi dasar penghitungan penganggaran, yang akan menjadi dasar penyusunan RKA SKPD dan selanjutnya menjadi bahan pertimbangan penyusunan RAPBD.

Pasar tradisional di Kabupaten Bantul merupakan salah satu penggerak roda perekonomian daerah, hal ini dikarenakan sekitar 14 % penduduk Kabupaten Bantul menggantungkan hidupnya di pasar tradisional. Keberadaan pasar tradisional diharapkan dapat mendorong pengembangan kawasan yang berpotensi sebagai pusat-pusat pertumbuhan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya pengelolaan pasar untuk dapat meningkatkan fungsi pasar tersebut.

Pemerintah Daerah selama ini menempatkan pasar tradisional sebagai sarana bagi masyarakat terutama yang bergerak di bidang usaha kecil dan menengah dalam melaksanakan kegiatan ekonominya. Dan menjadi amanat dari Perda 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 17 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 16 Tahun 2010, bagi Pemerintah Daerah untuk menumbuh kembangkan dan memfasilitasi kegiatan usaha kecil dan menengah yang secara mayoritas menggunakan pasar sebagai tempat usahanya. Dengan demikian Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melindungi keberadaan pasar tradisional dengan jalan meningkatkan baik dari sarana prasarana maupun pemberdayaan pelaku usaha agar masyarakat menjadi nyaman, aman dan membudaya untuk bertransaksi.

Dengan memahami tujuan tersebut, maka Renja Dinas Perdagangan memuat program kerja dan kegiatan yang merupakan bagian dari upaya pencapaiannya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun 2005-2025)
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 70);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);
14. Peraturan Bupati Bantul nomor 93 tahun 2007 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2016.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (Renja) adalah menentukan arah rencana kerja, kebutuhan anggaran Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul selama satu tahun kedepan, dengan melihat dan mengevaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya. Dengan demikian akan terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan perencanaan kegiatan SKPD.

Adapun Tujuannya adalah :

- a. Menjadi bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara;
- b. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul;
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dan sumber dana.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul disusun menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

I.1. Latar Belakang

I.2. Landasan Hukum

I.3. Maksud dan Tujuan

I.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan capaian Renstra OPD

2.2 Analisis kinerja pelayanan OPD

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD

3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Berdasarkan Perda Nomer 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul maka Dinas Perdagangan merupakan gabungan dari Bidang Perdagangan dinas Perindagkop dan Kantor Pengelolaan Pasar.

Evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi pelaksanaan pada Bidang Perdagangan Dinas Perindagkop tahun 2016 dan evaluasi pelaksanaan Kantor Pengelolaan Pasar pada tahun 2016.

Evaluasi bidang Perdagangan tahun 2016 adalah capaian **Sasaran meningkatnya nilai Eksport.** Upaya untuk meningkatkan eksport produk-produk yang berasal dari Bantul adalah dengan melakukan diversifikasi produk, sehingga kita jangan hanya bergantung pada produk-produk lama saja. Eksportir harus selalu melakukan inovasi terhadap produk yang selama ini dimilikinya. Produk-produk yang sampai saat ini masih positif untuk ekspor adalah perhiasan, permata, manufaktur, minuman, furniture dll. Pengusaha-pengusaha dari Bantul harus mulai berfikir untuk melakukan eksport produk-produk yang bernilai jual tinggi. Upaya yang dilakukan oleh Pemda Bantul dalam hal ini Dinas Perindagkop dengan memberikan bekal pelatihan kepada UKM yang berpotensi untuk melakukan ekspor. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan pelatihan terhadap 30 orang pengusaha/perajin yang berpotensi ekspor dan melakukan study komparasi ke PT Terminal Peti Kemas di Surabaya untuk mengetahui secara langsung proses barang dari eksportir diangkut ke Terminal Peti Kemas dan kemudian naik ke Kapal pengangkut ke Negara Tujuan. Harapannya dengan pengetahuan yang dimiliki mereka dapat melakukan eksport sendiri sesuai dengan produk yang dimiliki.

Dalam rangka untuk lebih memperkenalkan hasil-hasil produk unggulan Kabupaten Bantul ke manca negara khususnya ke negara-negara yang selama ini menjadi tujuan eksport, banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebagai sarana untuk mempertemukan pelaku usaha yang ada di Kabupaten Bantul dengan para pembeli (*buyer*) yang ada di manca negara telah dilakukan kegiatan Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri melalui pameran dan misi dagang ke Thailand. Kegiatan eksport dapat memperkokoh perekonomian nasional, karena dengan kegiatan eksport akan diperoleh devisa. Upaya-upaya pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang mendorong

meningkatnya ekspor melalui penyederhanaan peraturan yang berkaitan dengan ekspor, pemerintah menghilangkan rintangan dan pembatasan yang menyebabkan biaya produksi barang-barang ekspor menjadi tinggi. Upaya pemerintah tersebut membawa dampak terhadap pertumbuhan ekspor kabupaten Bantul. Hal ini terlihat dari terlampauinya target pertumbuhan ekspor sebagaimana tersaji pada yang tabel dibawah ini :

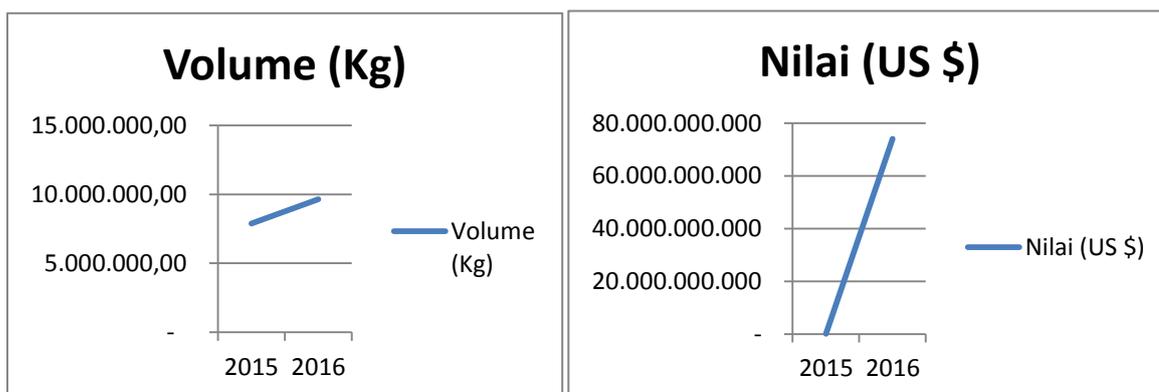
Tabel 2.1
Rencana Realisasi Capaian

Indikator	Capaian 2015	2016			Target Akhir RPJMD	Capaian s.d 2016
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Pertumbuhan Ekspor	-	7%	7,04%	100,14%	7%	7,04%

Tabel 2.2
Data Pertumbuhan Ekspor

2015		2016	
VOLUME (Kg)	NILAI (US \$)	VOLUME (Kg)	NILAI (US \$)
7.871.678,60	66.626.177,34	9,642,793,219	73,971,386,116.80

Grafik 2.1



Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa realisasi ekspor tahun 2016 telah melampaui dari target yang telah ditetapkan dengan didukung oleh beberapa program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor,
2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
3. Program Pembinaan Pedagang Kaki lima dan Asongan
4. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaa
5. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Evaluasi yang dilakukan untuk Kantor Pengelolaan Pasar dari 3 sasaran capaiannya sebagaimana dalam tabel dibawah ini

Tabel 1. Evaluasi Capaian Kinerja

No	Sasaran	Capaian Kinerja	Skala Pengukuran Ordinal				Ket
			Sangat Berhasil 85 s.d. 100	Berhasil 70 s.d. 85	Cukup Berhasil 55 s.d.70	Kurang < 55	
1.	16 Pasar dalam kondisi baik dapat terwujud dalam 5 tahun	100%	Sangat berhasil	I			Seluruh stakeholder pasar
2.	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	82,98		Berhasil			Kasubbag TU
3.	Tercapainya target PAD dari pengelolaan pasar	109,18%	Sangat berhasil				Kasie Pendapatan

Sedangkan capaian Pendapatan Kantor Pengelolaan Pasar sebagaimana tercantum dalam table dibawah ini

Tabel 2. Pendapatan

Uraian	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	(KURANG)/LEBIH	Realisasi (%)
Pendapatan asli daerah	3,380,549,050	3,690,777,725	310,228,675	109.18%
Retribusi Pelayanan Pasar	2,110,610,000	2,205,651,875	95,041,875	104.50%
Retribusi Sampah Pasar	212,204,000	211,315,800	(888,200)	99.58%
MCK Pasar	90,000,000	96,445,000	6,445,000	107.16%
Penerimaan Lain-lain	807,035,050	1,059,865,050	252,830,000	131.33%

Anggaran pendapatan dalam APBD Kabupaten Bantul yang dikelola di Kantor Pengelolaan Pasar Tahun 2016 adalah Memenuhi target Pendapatan Asli Daerah dari pungutan retribusi pasar sebesar Rp3,380,549,050 Sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, target tersebut telah terpenuhi 109,18% terdiri dari retribusi pelayanan pasar

terrealisasi :Rp 2,205,651,875,-(104,50%); Pencapaian pendapatan dari Retribusi sampah pasar Rp 211,315,800,-(99,58%); MCK Pasar Rp 96,445,000,-(107,16%); dan Penerimaan lain-lain Rp1.059,865,050 (131,33%) Seluruh Target **pendapatan Tahun 2016 telah dapat terlampaui.**

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD S.d Tahun berjalan 2015

	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ prosentase kegiatan	Target kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015	Target Renja SKPD Tahun 2014	Realisasi Renja SKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi	Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
								Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2015 (%)
I	Program Administrasi Perkantoran	Peningkatan IKM	93	93	93	100	93	90	96,7
1	Kegiatan Jasa Surat Menyurat	Prosentase Kegiatan Jasa Surat Menyurat	100	100	100	100	100	50.25	50.25
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik	prosentase kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik	100	100	67.63	100	100	16.26	16.26
3	Penyed. Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/ Op.	prosentase kegiatan Penyed. Jasa Pemeliharaan & Perizinan	100	100	51.14	100	100	8.80	8.80

		Kendaraan Dinas/ Op.							
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	prosentase kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	100	100	99.10	100	100	23.68	23.68
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	prosentase kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		100	100	100	100	-	-
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	prosentase kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	100	100	100	100	100	47.83	47.83

7	Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	prosentase kegiatan Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	100	100	99	100	100	40.83	40.83
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor	prosentase kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor	100	100	100	100	100	36.37	36.37
9	Penyediaan peralatan rumah tangga	Prosentase penyediaan peralatan rumah tangga			99.97	100	100	-	0
10	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	prosentase kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	100	100	96.97	100	100	10.88	10.88
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	prosentase kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	100	72.77	85	100	34.20	34.20
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	prosentase kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	100	100	99.64	100	100	26.43	26.43
13	Rapat-rapat koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	prosentase kegiatan Rapat-rapat koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	100	100	94.08	100	100	30.51	30.51
14	Rapat-rapat koordinasi & Konsultasi ke Dalam Daerah	prosentase kegiatan Rapat-rapat koordinasi & Konsultasi ke Dalam Daerah	100	100	100	100	100	9.67	9.67
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan IKM	93	93	93	100	93	90	96,7
1	Pengadaan mebeleur	prosentase pengadaan mebeleur	100				100	-	-
2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	prosentase kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	100	100	90.07	100	100	-	-
3	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	prosentase kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	100	100	98.97	100	100	35.29	35.29
4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebelair	prosentase kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebelair		100	100	100	100	-	100

5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Perlengkapan Kantor	prosentase kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Perlengkapan Kantor	100	100	88.32	100	100	9.26	9.26
6	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	prosentase kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	100	97.97	100	100	-	100
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Peningkatan IKM	93	93	93	100	93	90	96,7
1	Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	prosentase kegiatan Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	100	100	92.41	100	100	5.66	5.66
2	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi PNS	Prosentase pelaksanaan Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi PNS					100	69.73	69.73
IV	Prog. Peningk. Pengemb. Sistem Pelap. Capaian Kinerja & Keu.	Peningkatan IKM	93	93	93	100	90	90	96,7
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	prosentase kegiatan	100	100	97.38	100	100	41.15	41.15
2	Perencanaan dan koordinasi program kegiatan	prosentase kegiatan					100	17.47	17.47
V	Program Penciptaan Iklim UKM yang Kondusif	Pertumbuhan investasi	7	7	52.3	747.142	7	3.25	752.145
1	Perencanaan koordinasi dan pengembangan UKM			100	78.31		100	50	50

2	Fasilitasi Pengembangan UMKM	prosentase kegiatan Fasilitasi Pengembangan UKM	100	100	99.78	100		21.95	21.95
3	pemberian fasilitasi pengamanan kawasan usaha kecil menengah			100	98.65		100	34.20	34.20
4	Pemutakhiran Data UKM	prosentase kegiatan Pemutakhiran Data UKM							
5	Sinergitas Program Pusat dan daerah	prosentase kegiatan Sinergitas Program Pusat dan daerah							
6	Pemutakhiran Data Usaha Menengah dan Besar	prosentase kegiatan Pemutakhiran Data Usaha Menengah dan Besar							
7	Penyusunan Sekilas Informasi data indagkop			100	96.81				
8	Fasilitasi Pendampingan Kemasan Produk	prosentase kegiatan Fasilitasi Pendampingan Kemasan Produk							
VI	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Peningkatan Nilai Produksi	1	1	0.02	2	1	0.001	2
1	Pengembangan Fasilitas Pranata Pengukuran, Standarisasi, Pengujian dan Kualitas	prosentase kegiatan Pengembangan Fasilitas Pranata Pengukuran, Standarisasi, Pengujian dan	100	100	81.79	100	100		
2	Pengujian Limbah	Prosentase kegiatan pengujian limbah	100						
VII	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Pertumbuhan Investasi	7	7	52.3	747.1428 571	7	3.25	752.145

1	Koord. Antar lembaga dlm pengendalian pelaks. Investasi PMDN/PMA	prosentase kegiatan Koord. Antar lembaga dlm pengendalian pelaks. Investasi PMDN/PMA	100	100	97.02	100	100	38	38
2	Penyelenggaraan Pameran Investasi	prosentase kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi	100	100	100	100	100		0
3	Misi Investasi (Gelar potensiinvestasi)	prosentase kegiatan Misi Investasi (Gelar potensiinvestasi)	100	100	99.45	100	100	100	100
4	Workshop Potensi Investasi	prosentase kegiatan Workshop Potensi Investasi		100	99.04	100	100		0
VIII	Program Perlindungan Konsumen & Pengamanan Perdagangan	penurunan barang tidak layak edar	5%	5%	5%	100	5%	3%	80%
1	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	prosentase kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	100	100	100	93.58	100	60	60
2	Workshop perlindungan konsumen	prosentase kegiatan	100	100	100	100	100	100	100
3	Pengendalian harga barang kebutuhan pokok	prosentase kegiatan	100	100	98.24		100	42	42
IX	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Peningkatan nilai produksi	1	1	0.02	2	1	0.001	2
1	Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan	prosentase kegiatan Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan	100	100	100	100	100	9.92	9.92

2	Fasilitasi terhadap Industri Kecil dan Menengah	prosentase kegiatan Fasilitasi terhadap Industri Kecil dan Menengah	100	100	99	99	100		0
3	Pembinaan IKM melalui Dekranas Kab. Bantul	prosentase kegiatan Pembinaan IKM melalui Dekranas Kab. Bantul	100	100	87.42	87.42	100	8.95	8.95
4	Fasilitasi dan Pemberdayaan Industri Kecil	prosentase kegiatan Fasilitasi dan Pemberdayaan Industri Kecil	100	100	58.36	58.36	100		
5	Operasional Asistensi Perijinan Bidang Industri	prosentase kegiatan Operasional Asistensi Perijinan Bidang Industri		100	48.99	90	100		
6	Penguatan Kelembagaan Pokmas Pengelola Mesin Pupuk Organik	prosentase kegiatan Penguatan Kelembagaan Pokmas Pengelola Mesin Pupuk Organik	100	100	90.79	100	100	83.10	83.10
7	penyelenggaraan pelatihan industri	prosentase kegiatan	100	100	99.46	99.46	100		
8	Pembinaan dan Pemberdayaan Industri Kecil	prosentase kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Industri Kecil	100	100	63	100	100		
9	Promosi Produk Unggulan	Prosentase pelaksanaan Promosi produk unggulan	100	100	99.84		100		
10	Promosi melalui pameran PMPS	Prosentase pelaksanaan Promosimelalui PMPS	100	100	92.16	92.16	100		
11	Sistem Radiologi Keramik			100	98.31	98.31	100		
12	Fasilitasi HaKi kel IKM		100	100	72.67		100	33.70	33.70

X	Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Jumlah Wira Usaha	100	100	121	121 %	100	11	122
1	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	prosentase kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	100	100	99.80	100	100	11.75	100
XI	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Pertumbuhan investasi	7	7	52.3	747.1428 571	7	3.25	752.145
1	Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama dibidang investasi		100	100	97.50		100		
2	Sosialisasi Penyamaan Persepsi Pengembangan Investasi	prosentase kegiatan Sosialisasi Penyamaan Persepsi Pengembangan Investasi	100	100	97.04	100	100		
3	Penyusunan Master Plan Pengembangan Penanaman Modal	prosentase kegiatan Penyusunan Master Plan Pengembangan Penanaman Modal		100	100	100	100		
4	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	prosentase kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)		100	98.82	100	100		
5	Pemetaan Investasi Dalam Rangka Penyusunan Raperda Inisiatif	prosentase kegiatan Pemetaan Investasi Dalam Rangka Penyusunan Raperda Inisiatif						-	

6	Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	Prosesntase kegiatanpengembangan system informasi penanaman modal		100			100		
XII	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM	Pertumbuhan investasi	7	7	52.3	747.1428571	7	3.25	752.145
1	Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bg UMKM	prosentase kegiatan Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bg UMKM	100	100	88.93	50	100	43.03	0
2	Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM	prosentase kegiatan Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM	100	100	96.92	100	100		0
3	Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, IKM	prosentase kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, IKM	100	100	99.64	100	100	90.85	100
4	Penyelenggaraan Gelar Potensi Koperasi, UKM	prosentase kegiatan Penyelenggaraan Gelar Potensi Koperasi, UKM	100	100	88.39	100	100	-	-
XIII	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Pertumbuhan Ekspor	7	7	27	385.7142857	7	4	389
1	Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan luar negeri	prosentase kegiatan Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan luar negeri		100	100	90.09			
2	pelatihan manajemen perdagangan luar negeri		100	100	86.93	100	100	25.69	20
XIV	Program Penataan Struktur Industri	Pertumbuhan investasi	7	7	52.3	747.1428571	7	3.25	752.145

1	Pemberian fasilitas kerjasama industri dengan swasta	Prosentase pelaksanaan fasilitas kerjasam aindustri dengan swasta	100	100	58.99				
XV	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Pertumbuhan omset perdagangan	7	7	6.1	87.14285714	7	4	389
1	Fasilitas Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha	prosentase kegiatan Fasilitas Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha	100	100	99	100	100	18.80	67
2	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Prosentase kegiatan pengembangan pasar dan distribusi produk					100		
3	Pengembangan Kelembagaan kerja sama dan kemitraan	prosentase kegiatan Pengembangan Kelembagaan kerja sama dan kemitraan	100	100	94.68	100	100	27.64	41
4	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	prosentase kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	100	100	83.56	100	100	48.46	55
5	Pengembangan Pengelolaan Gudang dengan Sistem resi Gudang	prosentase kegiatan Pengembangan Pengelolaan Gudang dengan Sistem resi Gudang	100	100	94.61	100	100	1.78	17
XVI	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Peningkatan koperasi ber BH	2	2	1.7	85	2	-	85
1	Peningkatan sarana & prasarana penddkan dan	prosentase kegiatan		100	97.21	100	100	-	-

	pelatihan Perkoperasian								
2	Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan informasi	prosentase kegiatan Peningkatan sarana & prasarana penddkan dan pelatihan Perkoperasian		100	100	100	100	-	-
3	Sosialisasi prinsip-prinsip Pemahaman Koperasi	prosentase kegiatan Sosialisasi prinsip-prinsip Pemahaman Koperasi		100	68.45	100	100	-	-
4	Pembinaan , pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	prosentase kegiatan Pembinaan , pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi		100	100	98.11	100	30.18	36
5	Revitalisasi dan Pembangunan Koperasi	prosentase kegiatan Revitalisasi dan Pembangunan Koperasi		100	100	96.42	100		
6	Pembekalan manajemen bagi anggota DEKOPINDA	Prosentase Pembekalan manajemen bagi anggota DEKOPINDA	100			99.22	100		
7	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi			100	100	96.42	100		
XVI	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	peningkatan omset perdagangan	7	7	6.1	87.14285714	7	4	389
1	Pembinaan Organisasi Pedagang Kakilima dan asongan	prosentase kegiatan Pembinaan Organisasi Pedagang Kakilima dan asongan	100	100	97.77	100	10.70		0
XVI	Program Pengembangan sentra-sentra Industri	Pertumbuhan investasi	7	7	52.3	747.1428571	7		

	Potensial								
1	Penyusunan profil sentra	prosentase Penyusunan profil sentra			98.34	100			
2	Pendampingan Peruntukan Kawasan Industri	prosentase Pendampingan Peruntukan Kawasan Industri	100		98.18	100	100	-	-
XVI I	Program Pembangunan Insfrastruktur Pedesaan	peningkatan omset perdagangan	7	7	6.1	87.14285714	7	3.25	752.145
1	Pengembangan Pasar Pedesaan (Pendampingan Dana Stimulus Fiskal)	prosentase kegiatan Pengembangan Pasar Pedesaan (Pendampingan Dana Stimulus Fiskal)	100	100	99.43	100	100	1.91	1.91
XVI I	Program Pembangunan Gedung	peningkatan omset perdagangan	7	7	6.1	87.14285714	7	3.25	752.145
1	Pembangunan Gedung	prosentase kegiatan Pembangunan Gedung	100						

2.2. Analisis Kinerja SKPD

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Disperindagkop

Tujuan Misi	Sasaran	Indikator sasaran	realisasi					Target yang ingin dicapai	kon di akhir	Strategi	Kebijakan	Program
			Satuan	2016	2017	2019	2020	2017	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekspor	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas Ekspor Komoditas Perdagangan	1. Pertumbuhan Ekspor	%	7,04	8	9	10	8	7,04	Meningkatkan daya saing pelaku usaha	Peningkatan daya saing pelaku usaha	<ul style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan dan pengembangan Ekspor 2. Program Kerjasama Informasi dengan mass Media
2. Terwujudnya ketersediaan dan distribusi bahan pokok serta tata kelola sarana dan prasarana perdagangan yang mantap	Meningkatnya sarpras pasar dan pengelolaan pasar yang baik	prosentase pasar baik	%	na	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	Ketersediaan akses pasar yang memadai	Peningkatan akses dan sarana perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur 2. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. 3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 4. Program Pedagang Kaki Lima dan Asongan

												5. Program Pemberdayaan Pedagang 6. Program Pembangunan Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur perdesaan
3. Mewujudkan Pelayanan Prima dalam rangka Perlindungan Konsumen	Meningkatkan jumlah pelayanan tera dan tera ulang	3. Peningkatan prosentase pelaksanaan tera dan tera ulang	%	na	4	4,1	4,2	4,	4	Pelayanan prima tera dan tera ulang	Peningkatan jumlah pelayanan tera dan tera ulang	1. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan Modern	Peningkatan tata kelola organisasi serta kinerja dan pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	na	82	83	84	82	82	Modernisasi Perkantoran	Sistim Manajemen Mutu	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4. Program penataan Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi SKPD dan Catatan Strategis

Berikut ini isu-isu penting dari penyelenggaraan tugas fungsi SKPD

1. Belum tersedianya data yang akurat dan informasi yang berkualitas dan dapat dipakai sebagai bahan pengambilan keputusan;
2. Daya saing pelaku usaha dan sarpras yang harus ditingkatkan,
3. Sinergitas Program antara pusat dan daerah
4. Kebijakan antara pusat dan daerah
5. Program Pengurangan Kemiskinan
6. Adanya Kenaikan harga BBM
7. Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok
8. Biaya Produksi KUKM mengalami kenaikan yang berakibat pada turut naiknya harga produk KUKM Kabupaten Bantul
9. Daya Beli Masyarakat yang menurun berimbas pada keuntungan yang didapat.
10. Optimalisasi Operasionalisasi SRG
11. Optimalisasi Operasionalisasi PSG
12. Penjadwalan kegiatan yang lebih tepat

2.3.1. Rekomendasi Catatan Strategis.

1. Masyarakat Ekonomi ASEAN yang berlaku pada akhir tahun 2015 membutuhkan perhatian tersendiri, bagaimana Disperindagkop mempersiapkan KUKM Bantul agar mempunyai daya saing untuk tetap eksis didalam MEA.
2. Pertumbuhan KUKM memberi andil dalam penyerapan tenaga kerja serta pengentasan kemiskinan.
3. Adanya kenaikan harga BBM menyebabkan kenaikan harga kebutuhan pokok sehingga perlu dipantau secara berkelanjutan dampak yang terjadi terhadap masyarakat.

4. Pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok untuk mengantisipasi lonjakan harga dan kelangkaan kalau perlu dilakukan Operasi Pasar.
5. Penggunaan teknologi tepat guna dan peralihan peralatan bagi UKM yang masih menggunakan alat ber Bahan Bakar Minyak diganti dengan peralatan menggunakan daya listrik
6. Koordinasi, Sosialisasi dan penyusunan perencanaan yang matang bagi PSG, SRG serta Show Room Pandak
7. Perlunya Koordinasi dengan bidang terkait penganggaran dan penjadwalan sehingga kedepan dapat direncanakan jadwal dan anggaran yang lebih tepat.

2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD

Berikut ini beberapa hal penting dari rancangan awal RKPD yang menjadi landasan pembangunan kaitannya dengan rencana kerja dinas.

Disperindagkop Kabupaten Bantul menjalankan point ke enam dari Nawacita yaitu

: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

Adapun keseluruhan dari Nawacita adalah sebagai berikut :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi

demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2017
Kabupaten Bantul

Nama SKPD : Dinas Perdagangan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Ke giatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/K egiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pembangun an Infrastruktur Pedesaan	Kab.Bantul	Cakupan peningkat an kualitas Pasar Tradisional	3 Unit	24,379,317	Pembang unan Infrastrukt ur Pedesaan	Kab.Ba ntul	Cakupan peningkatan kualitas Pasar Tradisional	Pemban gunan pasar Pundong , Gumulan , Turi, Gatak, Mangira n, (5 unit)	25 milyar	

		Kab.Bantul	Cakupan peningkatan kualitas Pasar Tradisional	1 unit	800	Kab.Bantul	Kab.Bantul	Cakupan peningkatan kualitas Pasar Tradisional	32 pasar	1 milyar	
2	Kerjasama informasi dengan mass media	Kab.Bantul	Cakupan media sosialisasi	%	0	Kerjasama informasi dengan mass media	Kab.Bantul	Jumlah sosialisasi melalui Media masa	5 kali	71.000	
3	Penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Kab.Bantul	Jumlah Rekomendasi dan kajian evaluasi kebijakan Perdagangan, Industri dan jasa	1 dokumen	0						Program Dinas Koperasi ukm dan perindustrian
4	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Kab.Bantul	Jumlah temuan barang tidak layak edar	5 unit	510,997						

5	Peningkatan dan Pengembangan Ekspot	Kab.Bantul	Cakupan peningkatan keamanan dan kenyamanan Pasar	-	-	Peningkatan dan Pengembangan Ekspot	-	-	-	-	-
		Kab.Bantul	Jumlah komoditas eksport	9 Jenis	650	Promosi Perdagangan	Jakarta dan luar jawa	- Promosi perdagangan Regional DIY (be,pmps,Jifina,Paneran DIY),	13 kali		

								- Promosi Perdagangan Jawa (IFEK, Adiswara, PRJ, TEI, Pameran Jakarta, TTI Surabaya)			
								- Batun, Bali , Nedan, Banjarnasin			
								-			
6	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Kab. Bantul	Peningkatan Perdagangan	6%	2,680,600	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Keg. Fasilitas Perizinan	Kab. Bantul				

								<ul style="list-style-type: none"> - Izin usaha perdagangan 90 peserta - Buku data perush yg blm berizin - Laporan perkembangan usaha - Naskah akademi izin usaha perdagangan 	4 keg	341.400.000	
			Cakupan Peningkatan Promosi pasar	60%	276,592						
7	Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Kab.Bantul	Prosentase ketertipan PKL Pasca Penataan	100%	140						

8	Pemberdayaan Pedagang	Kab.Bantul	Cakupan Peningkatan Kualitas SDM Pasar	42%	191,015							
---	-----------------------	------------	--	-----	---------	--	--	--	--	--	--	--

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Terdapat usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui mekanisme MUSRENBANG dan telah ditelaah Disperindagkop Bantul.

Usulan Musrenbang Tahun 2015 :